

Mempertanyakan Indonesia: Tantangan dan Prospek Bagi “Indonesian Way” Sebagai Middle Power

Muhammad Fajar Anandi¹, Febri Triantama², Emil Radhiansyah³, Ica Wulansari⁴,
Mohammad Riza Widyarsa⁵

¹²³⁴⁵ Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Paramadina

ARTICLE INFO:

Paper Type:

Research Paper

Keywords:

Indonesia, Middle Power, International Politics

Article History

Received: 6 February 2025

Revised: 6 April 2025

Accepted: 3 June 2025

Available online: 3 July 2025

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

ABSTRACT

The rise of middle powers has reshaped global dynamics, reducing the dominance of traditional superpowers. Indonesia, now an emerging middle power, has the potential to influence global affairs and advance its national interests. This research analyzes Indonesia's position and explores its global challenges and opportunities. Despite its status, Indonesia hasn't fully leveraged its influence or achieved its goals. The study attributes this to two main factors: the lack of a clear identity as a middle power and the absence of a sustainable foreign policy blueprint.

*Corresponding author: fajar.anandi@paramadina.ac.id

Cite this article as: Anandi, M. F. (2025) *Mempertanyakan Indonesia: Tantangan dan Prospek Bagi “Indonesian Way” Sebagai Middle Power*. Paramadina Journal of Diplomacy & Foreign Policy, 02 (01), 39-48. <https://journal.paramadina.ac.id/index.php/diplomacyforeignpolicy>

1. Pendahuluan

Gagasan Indonesia menjadi *middle power* merupakan Visi Indonesia 2045. Visi tersebut tertuang dalam dokumen Kementerian PPN/ Bappenas pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa gagasan menjadikan Indonesia menjadi negara yang berpengaruh di Asia pasifik. Gagasan tersebut merencanakan posisi Indonesia menjadi *middle power* dan perlahan-lahan beranjak menjadi *major/ great power*. Identifikasi Indonesia menjadi negara yang berpotensi menjadi *middle power* ditunjukkan oleh Rosyidin dalam observasinya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Rosyidin, 2021). Dalam amatannya bahwa Yudhoyono secara aktif menggerakkan

Indonesia untuk menjadi *power rising* dalam kebijakan luar negerinya yang berorientasi ke luar (*outward-looking*). Pola kebijakan luar negeri masa pemerintahan Yudhoyono menunjukkan Indonesia unjuk identitas dan memiliki kapasitas membentuk tatanan internasional. Rosyidin pun menunjukkan dari sejumlah referensi bahwa kepemimpinan Yudhoyono memberikan arah terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang telah menjadi landasan Indonesia berperan penting dalam panggung internasional.

Dalam pencapaian status *middle power*, maka Indonesia perlu memainkan perannya secara efektif dalam skala regional dan mampu mengartikulasikan kepentingan negara-negara berkembang. Berdasarkan argumentasi tersebut, Karim memandang pembuatan kebijakan di

Indonesia belum mampu mengidentifikasi kepentingan dan bentuk konkret untuk mencapai status *middle power* (Karim, 2018). Dalam amanat Karim, Indonesia menjalankan perilaku *middle power* berbentuk sikap baik sebagai warga dunia melalui implementasi kebijakan luar negeri yang menonjol pada masa kepemimpinan Yudhoyono. Lebih lanjut, Karim pun menyoroti bahwa pengejaran status *middle power* Indonesia mengalami kelemahan pada masa kepemimpinan Joko Widodo yang lebih fokus membangun konteks domestik dalam kebijakannya.

Dalam tinjauan Santikajaya dipahami bahwa Indonesia tengah berproses untuk menuju *middle power* yang dapat dipahami melalui tiga parameter yaitu: 1) *attitude toward international order*, 2) *promoted role*, 3) *nexus between regional and global roles* (Santikajaya, 2016). Dalam parameter pertama yaitu *attitude toward the international order* yang dapat dipahami dari pernyataan Presiden Joko Widodo pada Peringatan Gerakan Non Blok ke-60 bahwa tatanan ekonomi internasional baru sudah diperlukan. Akan tetapi, hal tersebut merupakan retorika yang tidak memberikan rancangan atau perencanaan yang jelas mengenai upaya membangun tatanan ekonomi baru. Selanjutnya, parameter kedua yaitu *performed role* yang menempatkan Indonesia sebagai *bridge builder* yang lebih nyaman bertindak sebagai mediator tanpa harus bertindak konfrontatif menghadapi rival. Kemudian parameter ketiga, *nexus between regional and global roles* yang diamati melalui studi kasus hubungan formal antara ASEAN dan G20. Dalam hubungan tersebut, Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 dipandang Santikajaya tidak bertindak mewakili ASEAN karena lebih terkonsentrasi terhadap upaya menarik investor untuk kepentingan pembangunan infrastruktur di dalam negeri (Santikajaya, 2016).

Sementara itu, pandangan lain yang mengemuka adalah tentang menyoroti bagaimana Indonesia perlu kembali kepada sejarah bahwa Indonesia telah memiliki langkah besar dalam dekolonisasi global melalui Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 (Umar, 2023). Berdasarkan hal tersebut, Umar memiliki postulat bahwa Indonesia perlu mempertahankan konsepsi tatanan internasional dengan memelihara otonominya dalam politik internasional. Konsepsi tersebut berda-

sarkan amatan perbandingan masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan Joko Widodo (2014-2024) dalam konteks Liberal International Order (LIO) karena penulis berargumentasi bahwa Indonesia berkembang dalam konsepsi tatanan internasional. Dalam amannya, kedua Presiden melakukan perbedaan artikulasi interpretasi demokrasi dalam politik dunia. Presiden Yudhoyono memiliki visi tatanan internasional yang menyediakan ruang untuk Indonesia menunjukkan identitas sebagai negara yang demokratis. Sedangkan, Presiden Joko Widodo mengkritisi LIO dengan menekankan dampak demokrasi terhadap pembangunan berkeadilan. Sementara itu, baik Yudhoyono dan Joko Widodo merespon konsolidasi LIO dengan prinsip kebebasan, pentingnya pelaksanaan kerjasama multilateral, perlindungan hak asasi manusia dan globalisasi ekonomi. Selain itu, kedua presiden mengartikulasikan identitas demokratis yang serupa dengan menerapkan penghargaan terhadap kedaulatan dan *non-intervention*. Dalam pandangan Umar, Indonesia memiliki potensi mengembangkan *middle power* Asia yang unik apabila mampu konsisten menjalankan tiga unsur konsepsi Indonesia dalam tatanan dunia yaitu kedaulatan, kesetaraan yang berdaulat, dan multilateralisme.

2. Pembahasan

Pemaknaan Middle Power yang Problematis dan Ruang Pemaknaan Alternatif

Dinamika politik internasional yang sedang terjadi di dunia menyebabkan pembahasan mengenai negara *middle power* kembali banyak dilakukan. Indonesia sendiri sejak lama dikenal sebagai salah satu negara *Middle Power*, bersama dengan Australia, Kanada, Brazil dan Afrika Selatan (Holbraad, 1984). Pandangan akademisi yang menempatkan Indonesia sebagai *Middle Power* juga sejalan dengan pandangan Pemerintah Republik Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, berbagai elemen pemerintahan menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara *Middle Power* (Humas Setneg, 2015).

Seiring Indonesia jamak disebut sebagai negara *Middle Power*, beberapa literatur menyoroti bagaimana Indonesia menjalankan peranan-

nya. Beberapa literatur menyatakan bahwa Indonesia belum optimal atau bahkan gagal memaksimalkan posisinya sebagai negara *middle power*. Indonesia terkesan kikuk menjalankan peran yang melekat padanya sebagai negara *middle power* (Teo, 2022). Hal ini kemudian mengakibatkan Indonesia gagal menjadi pembangun jembatan antara negara *great powers* dengan *small powers* (Santikajaya, 2016). Diplomasi dan keaktifan multilateral yang dilakukan Indonesia sebagai negara *middle power* bahkan dianggap kerap sebatas formalitas (Scott, 2019).

Namun meski telah banyak literatur yang membahas mengenai *middle power* maupun literatur yang menyoroti kebijakan Indonesia, hingga saat ini tidak ada satu pemaknaan tunggal terhadap konsep *middle power* (Robertson, 2017). Para ahli memiliki pandangan tersendiri mengenai indikator suatu negara dikategorikan sebagai negara *middle power*. Secara sederhana setidaknya terdapat tiga pendekatan berbeda yang kerap digunakan dalam pendefinisian *middle power* (Beeson & Higgott, 2014; Robertson, 2017).

Pendekatan pertama adalah pendekatan tradisional. Pendekatan ini mendefinisikan *middle power* berdasarkan posisi negara dalam satu spektrum *power* yang terdiri dari negara *great power* dan *small power*. Indikator yang banyak digunakan dalam pendekatan ini adalah aspek militer dan ekonomi (Chapnick, 1999). Pendekatan kedua mendasarkan pengkategorian negara *middle power* dengan melihat pada kecenderungan perilaku negara-negara. Negara *middle power* dipandang memiliki kecenderungan berperilaku sebagai *good global citizenship* (Efsthathopoulos, 2018; Karim, 2018; Robertson, 2017). Sedangkan pendekatan ketiga adalah pendekatan yang menggunakan perspektif identitas dalam melakukan kategorisasi (Jordaan, 2017; Karim, 2018).

Robertson dalam tulisannya sebenarnya juga telah menjelaskan bahwa proses pemaknaan *middle power* masih sangat problematik. Menurut Robertson, pemaknaan *middle power* yang problematik disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pemaknaan yang ada selama ini sangat kental dipengaruhi oleh pertarungan antar mazhab atau *school of thought*. Kedua, pemaknaan *middle power* juga kerap menjadi bagian dari

pertarungan ideologi dan kepentingan dari elit politik suatu negara. Pertarungan yang terjadi menyebabkan pemaknaan dan implementasi kebijakan akan berubah mengikuti elit politik yang sedang memimpin. Ketiga, pemaknaan *middle power* juga tidak bisa dilepaskan dari bagaimana suatu negara mengidentifikasikan dirinya sendiri dan ingin menunjukkan posisinya yang lebih baik dari negara lain (Robertson, 2017). Dikarenakan pemaknaan *middle power* yang problematik dengan berbagai alasan tersebut, maka dibutuhkan satu pemaknaan *middle power* yang kontekstual.

Lebih lanjut, pemaknaan *middle power* yang pragmatis dan kontekstual menjadi solusi yang dibutuhkan untuk memahami konsep ini lebih dalam. Pemaknaan *middle power* yang pragmatis dan kontekstual sebagaimana disampaikan oleh Robertson menjadi sangat penting, dikarenakan dengan menghadirkan pemaknaan yang pragmatis dan kontekstual, maka kita akan dapat lebih memahami alasan suatu negara melakukan kebijakan luar negeri tertentu. Selain itu, pemaknaan yang kontekstual juga dapat menghadirkan proses evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih *practical*.

Berbekal argumentasi di atas, ruang berpikir muncul dan terbuka untuk mengkaji pemaknaan *middle power* secara kontekstual, yang kemudian menjadi arah penelitian ini. Artikel ini ditujukan untuk memberikan pemahaman *middle power* alternatif yang kontekstual dengan kondisi dan sumber daya Indonesia, atau *Indonesian Way*. Pemaknaan alternatif *Indonesian Way* yang akan disampaikan pada akhir artikel ini didasarkan pada pemetaan posisi Indonesia dalam konstelasi politik internasional kontemporer. Melalui *Indonesian Way* maka diharapkan Indonesia tidak hanya sekedar menyandang status sebagai negara *middle power* saja, melainkan menjadi *middle power* yang memainkan peranan besar dan berpengaruh besar bagi politik internasional atau dalam kata lain *impactful middle power*.

3. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif analitis. Yaitu suatu metode penelitian dengan mengungkapkan

masalah yang ada kemudian mengolah data, menganalisis, meneliti dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan pembahasannya disusun secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami (Sugiyono, 2014). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kombinasi antara studi kepustakaan. Setelah mengumpulkan data tersebut, peneliti kemudian melakukan analisa pada data-data yang dikumpulkan dan diklasifikasi pada bagian-bagian spesifik pada penelitian ini. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisa data yang sesuai untuk menjawab rumusan masalah dengan menggunakan kerangka pemikiran dan menuliskan kesimpulan.

Lanskap Global: Tantangan dan Potensi

Kondisi di atas juga tak lepas dari kondisi tatanan dunia internasional yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Menengok pada catatan sejarah, dunia internasional telah melalui beberapa tonggak penting yang membentuk tatanan seperti yang kita lihat hari ini. Perang Dunia I dan II, Perang Dingin, serta jatuhnya Uni Soviet dan Blok Timur Komunis pada akhir tahun 1980an adalah kejadian-kejadian penting yang membentuk hubungan internasional modern yang kita lihat saat ini. Secara khusus, era tahun 1990an menjadi yang paling mengemuka, karena sejak kejatuhan Uni Soviet dan sekutunya, Amerika Serikat muncul menjadi satu-satunya *super power* dalam kancah politik internasional, serta secara aktif berperan sebagai polisi dunia guna memastikan stabilitas global dan memperkuat sistem *Liberal International Order* atau LIO (Ikenberry, 2010).

Afirmasi bagi kedudukan Amerika Serikat sebagai satu-satunya *super power* dunia kemudian mendorong pada penyebaran secara luas nilai-nilai demokrasi-liberal, utamanya pada aspek ekonomi (Ikenberry, 2010). Bahkan negara-negara bekas Blok Timur secara aktif langsung mengadopsi nilai-nilai tersebut pasca jatuhnya Uni Soviet, menyebrang 180 derajat dari ideologi yang sebelumnya dipegang teguh. Lebih dari itu, beberapa negara komunis seperti China dan Vietnam telah lebih dulu mengambil langkah besar, dimana sistem ekonomi kapitalis yang menjadi produk turunan dari ideologi

Demokrasi Liberal diterapkan, guna mendorong pembangunan nasional. China telah lebih dulu mengadopsi sistem ini di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping pada tahun 1978, dan kemudian Vietnam dengan kebijakan *Đổi Mới* yang mulai diterapkan pada tahun 1986. Terbukti, mayoritas negara-negara yang mengadopsi sistem ekonomi liberal mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan dari tahun ke tahun (Ritchie, 2009). Kemajuan ini kemudian memunculkan "keajaiban-keajaiban" yang kita kenal, seperti *Four Asian Tigers* (Korea Selatan, Hong Kong, Singapura dan Taiwan), *Tiger Cub Economies* (Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina), serta beberapa fenomena-fenomena yang sama pada belahan bumi yang lain. Pada akhirnya, semua hal di atas semakin melegitimasi posisi Amerika Serikat sebagai pemandu kemajuan dan stabilitas dunia.

Berangkat dari perkembangan di atas, Amerika Serikat menjelma menjadi satu-satunya kekuatan dunia. Sistem internasional berubah dari sistem bipolar menjadi unipolar. Amerika Serikat dengan leluasa menancapkan pengaruh secara luas serta secara tidak langsung memaksa negara lain untuk mengikuti nilai-nilai yang dianutnya. Salah satu contoh dari kondisi ini adalah Invasi Irak pada tahun 2003. Mengatasnamakan kepentingan untuk mempertahankan diri dari ancaman senjata pemusnah massal, Amerika Serikat meluluhlantakkan Irak dan menumbangkan pemerintahan Saddam Hussein. Praktik yang kurang lebih sama juga dapat dilihat di Afghanistan. Tentu, dengan kekuatan yang tidak sebanding, Amerika Serikat dengan mudahnya memperoleh kemenangan. Walaupun demikian, alih-alih berhasil menciptakan kondisi yang lebih baik, Amerika Serikat telah gagal menuntaskan misinya. Afghanistan tidak menjelma menjadi negara yang lebih stabil dan aman, bahkan tindakan teror semakin sering kali terjadi, sebuah kondisi yang lebih parah jika dibandingkan dengan kondisi sebelum masuknya Amerika Serikat pada tahun 2001 (Shahrani, 2018). Puncak dari kondisi ini terjadi saat dengan mudahnya Taliban kembali menguasai Afghanistan setelah Amerika Serikat memutuskan untuk menarik seluruh pasukannya pada 30 Agustus 2021. Operasi yang dijalankan selama 20 tahun terbukti sia-sia. Sejalan dengan kondisi di Afghanistan, masa depan Irak juga tidak pasti.

Sejak agresi pada tahun 2003, masyarakat Irak terus dihadapkan pada eskalasi konflik yang tidak berkesudahan. Konflik sektarian antara kelompok Sunni dan Syiah, munculnya kelompok teroris ISIS, serta konflik-konflik lainnya membuat banyak cendekiawan hubungan internasional memprediksi masa depan Irak tak jauh berbeda dengan Afghanistan, atau bahkan lebih buruk (Wechsler, 2019).

Pada konteks lain, kedigdayaan sistem ekonomi kapitalis pada akhirnya juga dipertanyakan ketangguhannya. Hal ini terbukti dengan terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 yang melanda beberapa negara Asia, serta yang paling parah adalah krisis finansial global tahun 2008. Krisis-krisis tersebut tak lepas dari sistem kapitalis terbuka yang diusung dan diacu dari dunia barat, tentu dengan Amerika Serikat sebagai promotor utamanya. Merespon hal tersebut di atas, rasanya menjadi sebuah keniscayaan bagi pengembangan sistem internasional baru yang tidak hanya *American/Western oriented*. Sebuah kebaruan untuk melengkapi atau malah mengganti LIO menjadi sangat dibutuhkan.

Usulan di atas bukan tanpa alasan. Selain berkaca pada masalah-masalah yang dihadapi, dinamika global juga terus berubah. Salah satu contoh yang paling mengemuka adalah menjelannya China sebagai penantang bagi dominasi Amerika Serikat. Dalam kurun tiga dekade terakhir, China menunjukkan kemajuan yang sangat pesat baik pada aspek ekonomi, maupun kapabilitas pertahanan. Lebih dari itu, China juga mampu tampil sebagai negara berpengaruh di tatanan global. Investasi ekonomi, bantuan ekonomi dan pembangunan, serta dukungan lain telah berhasil memikat banyak negara. Ambisi *outward looking* China semakin kentara dengan diluncurkannya inisiatif *One Belt One Road* (OBOR) yang membentang dari Eropa hingga ke Asia Tenggara. Seolah berusaha menghidupkan kembali jalur sutera yang masyhur di masa lalu, China secara terang-terangan menunjukkan ambisinya. Pada sisi lain, perkembangan ini juga diikuti dengan keberanian China dalam menghadapi konfrontasi, bahkan dengan Amerika Serikat sekalipun. Contoh nyata dapat kita lihat di Laut China Selatan, dimana peluncuran peta teritorial baru China memantik reaksi keras dari beberapa negara tetangga. Sembilan garis putus-putus secara nyata memasukkan wilayah laut

Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, serta Malaysia (Rossiana, 2022). Bahkan, walaupun dalam putusan *Permanent Court of Arbitration* tahun 2016 tentang sengketa antara Filipina dan China, klaim tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum internasional, China tetap tak bergeming dan bertahan pada kebijakannya (Gunawan et al., 2022). Pada akhirnya, putusan tersebut seolah tak mengikat dan sekedar formalitas yang tidak dianggap oleh China. Lebih dari itu, potensi konflik terbuka juga mewarnai dinamika yang ada. Kasus Taiwan dapat menjadi penyebab utama konflik tersebut, serta pengembangan pangkalan militer di pulau-pulau sengketa yang secara geografis semakin mendekat dengan pangkalan militer Amerika Serikat. Sebuah sinyal nyata bahwa China tak gentar dan akan terus menjaga pemenuhan kepentingan nasionalnya.

Selain itu, kemunculan negara-negara *middle power* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya juga semakin mewarnai dinamika politik global. Walaupun memiliki kapabilitas yang beragam, baik dari sisi ekonomi maupun kemampuan militer, kelompok negara ini memiliki karakteristik yang sama, yaitu sebagai negara yang berkomitmen pada tatatan internasional dan perdamaian. Selain itu, negara-negara ini juga secara aktif terlibat aktif dalam organisasi internasional, mendukung agenda pembangunan global, dan yang paling penting menjunjung tinggi supremasi hukum internasional (Polanunu & Kusumaningrum, 2022). Dengan jumlah yang semakin bertambah, posisi *middle power* semakin diperhitungkan. Salah satu contoh nyata adalah dibentuknya *Group of 20* atau G20. Dalam kelompok ini, eksistensi dan signifikansi negara-negara *middle power* semakin diakui, apalagi G20 merepresentasikan 85% produk domestik bruto (PDB) dunia (OECD, 2023), dimana porsi negara-negara non *Group of 7* (G7) yang merupakan negara-negara *middle power* sebesar 44,64% dari total PDB dunia (Statista, 2021). Angka ini menunjukkan signifikansi negara-negara *middle power* dan dengan profil kekuatan yang berbeda-beda, dapat membawa aspirasi global yang lebih inklusif, termasuk dari negara-negara berkembang lain dan negara-negara miskin.

Pada sisi lain, negara-negara *middle power* juga semakin aktif mengembangkan kerangka

kerja sama alternatif. Organisasi-organisasi baru seperti BRICS yang diinisiasi oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta MIKTA yang dibentuk oleh Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, hadir mewarnai dinamika politik internasional. Terbaru, BRICS telah mendapatkan anggota baru yaitu Arab Saudi, Argentina, Ethiopia, Iran, Mesir, dan Uni Emirat Arab pada tahun 2023, dan tentunya diikuti dengan penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh pada tahun 2025 ini.

Walaupun praktik ini jamak ditemui, pembentukan forum seperti dua contoh di atas memiliki arti penting, yaitu langkah untuk mencari instrumen alternatif dalam mencapai kepentingan nasional yang diperkuat dengan daya tawar kolektif, serta meningkatkan pengaruh pada kancah global. Selain itu dalam dinamika global, forum-forum ini dapat diartikan sebagai ancaman bagi dominasi barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat (Chakraborty, 2018). Keberadaan forum maupun organisasi sejenis mendorong kepada pembentukan tatanan baru dan berpotensi menggusur sistem unipolar yang selama ini telah memimpin tatanan dunia. Keberagaman latar belakang yang dimiliki oleh negara-negara anggota forum-forum ini juga menyumbang kemunculan haluan-haluan baru bagi kepentingan global, yang mungkin selama ini tidak banyak didengar karena *global power* tersentral pada negara-negara barat (Nazri, 2021). BRICS yang menguasai 35% PDB dunia (Statista, 2024), secara kolektif dapat membantu menyuarakan lebih banyak kepentingan negara-negara *Global South* di tingkat global (Chakraborty, 2018). Bahkan, secara terang-terangan hal inilah yang menjadi alasan aplikasi Mesir sebagai anggota baru BRICS, sebagaimana diutarakan oleh Presiden Abdel Fattah el-Sisi (Egypt, 2023).

Perkembangan seperti di atas bisa jadi akan semakin banyak kita lihat kedepannya. Dengan kemunculan negara-negara *middle power* yang semakin banyak, dominasi barat tidak akan lagi menjadi satu-satunya acuan norma dan aturan bagi masyarakat internasional. Dengan kapabilitas yang dimiliki, serta disertai dengan kekhasan latar belakang, negara-negara *middle power* akan dapat mewarnai tatanan global yang ada saat ini, tak terkecuali bagi Indonesia.

Usulan Indonesian Way

Dalam argumentasi yang dikemukakan oleh Higgott dan Nosal serta Coper, bahwa politik internasional merupakan wilayah interaksi antar aktor negara secara multilateral yang memerlukan suatu bentuk keterampilan untuk menciptakan hubungan-hubungan yang saling menguntungkan dengan pertimbangan kapabilitas, kekuatan militer, letak dan luas geografi yang dimiliki oleh aktor negara (Karim, 2018). Walaupun kehadiran kelompok *middle power* dalam pandangan ketiganya memiliki peran sebagai katalisator, fasilitator dan kontrol, namun dalam pandangan Karim peran tersebut cenderung mencerminkan pandangan perilaku dari kelompok *middle power* barat.

Dalam pandangannya Karim berpendapat pendekatan terhadap status *middle power* tidak hanya tergantung dari bagaimana posisi aktor negara atas sumber daya yang dimilikinya namun juga tercermin dari perilaku politik luar negerinya. Namun demikian dalam pencapaian status tersebut, aktor negara perlu untuk mengidentifikasi dirinya pantas menyandang status sebagai sebuah kekuatan menengah yang patut dipertimbangkan peranannya. Tentu saja Identifikasi yang dilakukan oleh aktor negara tersebut berkaitan erat dengan pandangan seberapa jauh pemangku kepentingan melihat persoalan internasional merupakan bagian penting dalam proses pembentukan kebijakan negaranya dan turut serta terlibat secara aktif. Oleh karenanya status sebagai *middle power* dapat diraih melalui keterlibatan aktor negara secara aktif dalam forum dan aktivisme internasional, dengan demikian kehadiran sebuah aktor negara dapat memenuhi harapan aktor negara lain dan mendapatkan pengakuan dari aktor negara lain atas identifikasi posisi negara tersebut.

Beberapa pendapat menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan status *middle power* (Emmers & Teo, 2015; Karim, 2018; Poetri et al., 2018; Triwibowo & Martha, 2021). Status ini didasarkan pada dimensi luas wilayah, jumlah populasi, pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik dalam negeri dengan mengusung sistem politik demokrasi. Selain itu serta karakteristik perilaku politik luar negeri yang mengedepankan multilateralisme, mengedepankan perilaku demokrasi, serta bertindak untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkem-

bang dan menjembatani hubungan antar negara-negara yang mengalami permasalahan, menjadi faktor yang membentuk pandangan terhadap status Indonesia sebagai *middle power*. Ditambah dengan fakta bahwa Indonesia juga merupakan sebuah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, ruang gerak Indonesia sebagai sebuah negara *middle power* seharusnya menjadi lebih leluasa. Identitas Muslim, demokratis, plus profil demografi yang sangat beragam dan multikultural, membuat Indonesia menjadi *middle power* yang sangat fleksibel untuk bergerak di spektrum-spektrum penting dalam kancah internasional.

Hal di atas sejalan dengan pandangan Liow (2018), Karim (2018), serta Triwibowo dan Martha (2021), yang menjelaskan bahwa peran Indonesia dalam sentralitas kerjasama antar negara dalam ASEAN sebagai sebuah bentuk kerjasama multilateral, dan penyelenggaraan Bali Democracy Forum sebagai platform pengenalan ide dan norma universal Masyarakat Internasional kepada negara-negara Asia Tenggara, telah menghantarkan Indonesia kepada posisi Pemimpin Regional. Belum lagi profil sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia juga dapat bergerak untuk menyuarakan aspirasi serta kepentingan negara-negara *Global South*, yang tak terbantahkan hingga saat ini masih sering terpinggirkan.

Pencapaian ini membuat Indonesia memiliki posisi strategis pada level global di mana Indonesia memainkan peran yang lebih besar pada lingkungan Indo-Pacific dan G20. Penyebutan Indonesia sebagai *middle power* mungkin agak sedikit berlebihan pada ruang lingkup kebijakan luar negeri Indonesia. Walaupun demikian, Marty Natalegawa dan senada dengan pernyataan cendekiawan politik Detlef Nolte yang dikutip oleh Faisal Karim bahwa posisi Indonesia adalah sebagai sebuah kekuatan regional yang memiliki perhatian dan memainkan peran lebih tinggi pada kepentingan global (Karim, 2018). Baru pada periode Kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014) dan Joko Widodo (2014-2024) penggunaan kata *middle power* disematkan sebagai tujuan dan peranan Indonesia yang hendak dicapai pada level global namun dengan memilih secara cermat pada keterlibatan Indonesia pada bidang dan isu yang

memiliki keterkaitan dengan kepentingan nasional Indonesia.

Merujuk pada pernyataan terakhir di atas, menurut pandangan penulis, Pemerintah Indonesia tidak secara konsisten membangun dan menunjukkan posisi dan statusnya sebagai negara *middle power* yang ditunjukkan pada kemampuan riilnya. Dengan demikian pemilihan isu internasional yang sesuai atau sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, hanya menunjukkan dengan jelas bahwa pelibatan Indonesia sebagai entitas dalam politik internasional hanya sebatas pada keuntungan kepentingan politik pemangku kebijakan semata. Atau dengan kata lain, Indonesia sekedar menjadi sebuah "*middle power on-demand*" yang muncul dan bertindak selayaknya sebuah *middle power* hanya saat dianggap perlu atau sejalan dengan kepentingan yang ada. Selain itu, berkaca pada dua model era pemerintahan di atas, kesinambungan kebijakan luar negeri sebagai *middle power* Indonesia belum dapat terwujudkan. Perubahan kebijakan luar negeri yang kontras kami argumentasikan sebagai sebuah produk kepentingan rezim yang sedang berkuasa, tanpa memastikan kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai sebuah *middle power*. Walaupun sebuah hal yang wajar jika tiap-tiap pemerintahan memiliki coraknya tersendiri, namun penting untuk memiliki sebuah kekhasan. Variabel sebagai sebuah *middle power* harusnya sesuatu yang tetap dan dapat menjadi acuan serta identitas riil Indonesia yang sesungguhnya dan diakui dunia.

Berangkat dari hal tersebut di atas, terdapat dua usulan yang dapat menjadi "*Indonesian Way*" dalam kapasitas sebagai sebuah *middle power*. Usulan pertama adalah memaksimalkan keleluasaan sebagaimana tersebut di atas untuk berperan menjembatani dialog serta penyampaian aspirasi internasional. Sebagai bagian dari *Global South*, Indonesia menjadi motor penggerak bagi pemenuhan aspirasi serta kepentingan negara-negara pada spektrum yang sama. Pada sisi lain, sebagai sebuah negara demokratis, Indonesia dapat bergerak secara leluasa dengan negara-negara *Global North* yang juga memiliki karakteristik yang sama. Dengan kapasitas yang dapat berdiri pada dua spektrum ini, Indonesia dapat secara aktif menjembatani komunikasi dan dialog antara kedua kelompok ini. Ditambah dengan identitas negara Muslim

yang moderat, peran *middle power* Indonesia menjadi semakin lengkap dan akan berdampak lebih luas.

Walaupun demikian, usulan ini harus diejawantahkan secara rasional, terukur, dan efisien. Ruang gerak sebuah negara *middle power* tak terbantahkan harus ditopang dengan sumber daya yang mumpuni. Seperti contoh yang dikemukakan oleh Emmers & Teo (2015), Korea Selatan bisa mengambil inisiatif dalam masalah keamanan di wilayah Asia-Pasifik terkait dengan ancaman dari Korea Utara. Tidak hanya dalam mengambil inisiatif, tetapi Korea Selatan mampu untuk membuat Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas Asia-Pasifik dalam menghadapi ancaman Korea Utara. Selain itu, Emmers & Teo, lebih jauh lagi juga mengungkapkan, bahwa negara seperti Indonesia yang mempunyai sumber daya yang rendah dalam bidang pertahanan, harus menyesuaikan dengan kapabilitas yang dimiliki untuk mengamankan Kawasan Asia-Pasifik. Penyesuaian yang ada tidak serta-merta kemudian menggeser posisi Indonesia sebagai sebuah *middle power*. Keterbatasan kapasitas yang dimiliki sebenarnya dapat menjadi justifikasi logis bagi Indonesia untuk bertindak. Indonesia tidak harus selalu muncul pada konstelasi-konstelasi yang ada. Indonesia secara leluasa dapat memilih untuk terlibat secara aktif, pengamat, penghubung, ataupun peran lain yang disesuaikan dengan kapasitas yang ada.

Sebagaimana kita ketahui, status *middle power* yang melekat bukan semata-mata privilese yang menguntungkan, tetapi juga diikuti dengan tanggung jawab yang melekat (Umar, 2023). Oleh karena itu, Indonesia dapat memilih tanggung jawab apa yang harus diemban sebagai sebuah *middle power*, dengan berkaca pada kemampuan yang dimiliki. Terlebih lagi dengan kondisi *middle power* tanpa patron, Indonesia tidak memiliki “hutang budi” untuk bertindak sesuai dengan keinginan patron, yang kadang kala di luar kemampuannya. Walaupun demikian, implementasi ini memerlukan sebuah arah jelas yang diikat dengan sebuah cetak biru kebijakan luar negeri yang berkelanjutan, guna meminimalisir sempalan kepentingan elit sebagaimana disebutkan sebelumnya. Pada akhirnya, dengan posisi ini, Indonesia dapat mengimplementasikan sebuah status *middle power* yang on-

demand dalam arti kata yang positif, dengan berdasarkan pada rasionalitas: bergerak sesuai dengan kemampuan, secara efisien, serta berdampak. Meminjam analogi ekonom terkenal Milton Friedman tentang spesialisasi dan kemakmuran, dengan berfokus pada spesialisasi yang dimiliki, Indonesia dapat bergerak maju sebagai sebuah negara *middle power* yang mumpuni dan disegani dunia internasional.

4. Kesimpulan

Indonesia telah lama dikenal sebagai salah satu negara *middle power*. Namun meski pemakaian *Middle Power* yang masih problematik, hingga saat ini masih terdapat anggapan bahwa Indonesia belum optimal menjalankan peranannya. Hal ini disebabkan oleh pemerintah belum cukup cerdas memanfaatkan sumber daya yang kita miliki. Oleh karena itu dibutuhkan perubahan paradigma pemerintah dalam memaknai status negara *middle power* yang mempertimbangkan karakter dan keunikan Indonesia. Melalui penerapan paradigma status *Middle Power on Demand* dan *Indonesian Way*, Indonesia akan mampu menjelma menjadi *impactful middle power* ditengah konstelasi politik internasional yang semakin dinamis.

Referensi

1. Beeson, M., & Higgott, R. (2014). The changing architecture of politics in the Asia-Pacific: Australia's middle power moment? *International Relations of the Asia-Pacific*, 14(2), 215–237. <https://doi.org/10.1093/irap/lct016>
2. Chakraborty, S. (2018). Significance of BRICS: Regional Powers, Global Governance, and the Roadmap for Multipolar World. *Emerging Economy Studies*, 4(2), 182–191. <https://doi.org/10.1177/2394901518795070>
3. Chapnick, A. (1999). The middle power. *Canadian Foreign Policy Journal*, 7(2), 73–82. <https://doi.org/10.1080/11926422.1999.9673212>
4. Efsthopoulos, C. (2018). Middle Powers and the Behavioural Model. *Global Society*, 32(1), 47–69. <https://doi.org/10.1080/13600826.2017.1351422>
5. Egypt, S. I. S. (2023, August 24). Statement by President Abdel Fattah El-Sisi on BRICS's membership invitation to Egypt. <https://>

- www.sis.gov.eg/Story/185409/Statement-by-President-Abdel-Fattah-El-Sisi-on-BRICS
6. Emmers, R., & Teo, S. (2015). Regional security strategies of middle powers in the Asia-Pacific. *International Relations of the Asia-Pacific*, 15(2), 185–216.
7. Gunawan, Y., Irrynta, D., García Segura, C., & Pareja Alcaraz, P. (2022). Dispute Resolution between the Philippines and China: Fishing Activities in the South China Sea. *UNISCI Journal*, 20(59), 59–73. <https://doi.org/10.31439/UNISCI-141>
8. Holbraad, C. (1984). *Middle powers in international politics*. Macmillan.
9. Humas Setneg. (2015, January 8). Bantah Tarik Diri Dari Internasional, Menlu: Indonesia Terus Mainkan Peran Middle Power. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/bantah-tarik-dari-dari-internasional-menlu-indonesia-terus-mainkan-peran-middle-power/>
10. Ikenberry, G. J. (2010). The restructuring of the international system after the Cold War. In M. P. Leffler & O. A. Westad (Eds.), *The Cambridge History of the Cold War* (1st ed., pp. 535–556). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CHOL9780521837217.026>
11. Jordaan, E. (2017). The emerging middle power concept: Time to say goodbye? *South African Journal of International Affairs*, 24(3), 395–412. <https://doi.org/10.1080/10220461.2017.1394218>
12. Karim, M. F. (2018). Middle power, status-seeking and role conceptions: The cases of Indonesia and South Korea. *Australian Journal of International Affairs*, 72(4), 343–363. <https://doi.org/10.1080/10357718.2018.1443428>
13. Liow, J. (2018). Can Indonesia Fulfill Its Aspirations to Regional Leadership? In *International Relations and Asia's Southern Tier ASEAN, Australia, and India* (pp. 175–187). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-10-3171-7_12
14. Nazri, N. (2021, May 18). The BRICS Bloc: A Pound-for-Pound Challenger to Western Dominance? *E-International Relations*. <https://www.e-ir.info/2021/05/18/the-brics-bloc-a-pound-for-pound-challenger-to-western-dominance/>
15. OECD. (2023). About—Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/g20/about/>
16. Poetri, D. A., Govindasamy, G., & Md Akhir, M. N. (2018). Republic of Korea-Indonesia Relations: Middle Power Diplomacy in East Asia. *International Journal of East Asian Studies*, 7(1), 59–77. <https://doi.org/10.22452/IJEAS.vol7no1.4>
17. Polanunu, A. B. D., & Kusumaningrum, D. N. (2022). Indonesia Sebagai Middle Power: Strategi Niche Diplomacy dalam Manifestasi Pembangunan Kelautan Berkelanjutan Berbasis Blue Economy. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 146. <https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.36645>
18. Ritchie, B. K. (2009). Economic upgrading in a state-coordinated, liberal market economy. *Asia Pacific Journal of Management*, 26(3), 435–457. <https://doi.org/10.1007/s10490-008-9089-0>
19. Robertson, J. (2017). Middle-power definitions: Confusion reigns supreme. *Australian Journal of International Affairs*, 71(4), 355–370. <https://doi.org/10.1080/10357718.2017.1293608>
20. Rossiana, Y. S. (2022). The South China Sea Dispute: Code of Conduct Implementation as the Dispute Settlement. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 8(1). <https://doi.org/10.33172/jdp.v8i1.884>
21. Rosyidin, M. (2021). The Moment of a Rising Power: Indonesia's Foreign Policy Activism, 2004-2014. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.33822/mjihi.v4i1.2892>
22. Santikajaya, A. (2016). Walking the middle path: The characteristics of Indonesia's rise. *International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis*, 71(4), 563–586. <https://doi.org/10.1177/0020702016686381>
23. Scott, D. (2019). Indonesia Grapples with the Indo-Pacific: Outreach, Strategic Discourse, and Diplomacy. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 38(2), 194–217. <https://doi.org/10.1177/1868103419860669>
24. Shahrani, M. N. (Ed.). (2018). *Modern Afghanistan: The Impact of 40 Years of War*. Indiana University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv8j6dx>
25. Statista. (2021). G20: GDP by country 2021 and 2027 | Statista. <https://www.statista.com/statistics/722944/g20-country-gdp-levels/>
26. Statista. (2024, October 22). Infographic: The Global Clout of the New BRICS. *Statista Daily Data*. <https://www.statista.com/chart/33311/brics-share-of-global-gdp-and-population>
27. Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
28. Teo, S. (2022). Middle Power Awkwardness? Indonesia's Norm Entrepreneurship in ASEAN. In G. Abbondanza & T. S. Wilkins (Eds.), *Awkward Powers: Escaping Traditional Great and Middle Power Theory* (pp. 151–176). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0370-9_6

29. Triwibowo, A., & Martha, J. (2021). Diplomasi Middle-Power Indonesia di Masa Pandemi. *Indonesian Perspective*, 6(2), 123–141. <https://doi.org/10.14710/ip.v6i2.43540>
30. Umar, A. R. M. (2023). The rise of the Asian middle powers: Indonesia's conceptions of international order. *International Affairs*, 99(4), 1459–1476. <https://doi.org/10.1093/ia/iia167>
31. Wechsler, W. F. (2019). 1. US Withdrawal from the Middle East: Perceptions and Reality.